



# **RENCANA KERJA TAHUN 2024**



**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**



# PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR : TAHUN 2023

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

#### KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam urusan perencanaan dan Pembangunan penelitian dan pengembangan perlu disusun Rencana Kerja (renja) Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tentang penunjukkan Tim Pelaksanaan Kegiatan Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822);
2. Undang – undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim pelaksana Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dengan susunan personalisasi Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan, mengolah, dan mengkompilasi serta menganalisis data rencana kerja tahun 2024;
  - b. Membahas dan mencermati perencanaan Pembangunan penelitian dan pengembangan daerah
  - c. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Renja.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pelaksana Penyusunan Renja 2024 bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanakan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal : Desember 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**



- LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**
- NOMOR : TAHUN 2023**
- TANGGAL : DESEMBER 2023**
- TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024**

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024**

I.	Penanggung Jawab	:	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow
II.	Tim Penyusun	:	
	Ketua	:	Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow
	Sekretaris	:	Kasubag Program Keuangan dan Pelaporan
	Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Aparatur</li> <li>2. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi</li> <li>3. Kepala Bidang Disiplin, Fasilitasi Profesi dan Informasi Aparatur</li> <li>4. Indrawan Purnadi Kolopita</li> <li>5. Irwan Pasanai</li> </ol>

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**



**Drs. UMARUDIN R. AMBAH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670319 199308 1 001**

## KATA PENGANTAR

Kami mengawali penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini dengan ungkapan syukur ke hadirat Allah SWT dengan harapan agar kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow dapat tercapai dengan baik sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dan program dan kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. .

Rencana kerja ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Rencana kerja perangkat daerah merupakan turunan dari dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow , dan RPD Kabupaten Bolaang Mongondow 2023-2026.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 yang baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Lolak, Juli 2023

Kepala Badan Kepegawaian  
Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bolaang  
Mongondow

Drs. UMARUDIN RAISJI AMBAH  
NIP. 19670319 199308 1 00

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	5
1.1. LATAR BELAKANG .....	5
1.2. LANDASAN HUKUM .....	7
1.3. MAKSDUD DAN TUJUAN .....	9
1.4. SISTIMATIKA PENULISAN .....	9
BAB II EVALUASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	34
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH .....	35
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	38
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH .....	40
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD .....	40
2.5 PENELAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN .....	41
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	32
3.1 TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .....	38
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH .....	
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN .....	
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	
BAB. V. PENUTUP .....	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow adalah penjabaran rencana kerja lima tahunan berupa renstra. Sehingga Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024;
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Rumusan Rencana Kerja Awal (Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow yang selanjutnya disebut Renja Awal Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 yakni : “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Berdisiplin, Profesional, Loyal, Berwawasan Global, Bermoral dan mampu menjadi unsur Pemersatu menuju Bolaang Mongondow Hebat”. dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Pemerintahan di Tahun 2024 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow yakni melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow menyusun Rencana Kerja Tahun 2024. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Renstra 2023-2026. Renja Perangkat Daerah yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow adalah :

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepagawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
- j. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
- l. Peraturan Bupati nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- m. Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2022);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023;
- o. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk merumuskan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2024.

### **1.3 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunana Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebagai berikut :

#### **BAB I : Pendahuluan,**

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;

#### **BAB II :Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu,**

Bab ini berisi :

#### **2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dan capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 (n-1) serta pencapaian tahun berjalan tahun 2022 (n) dan perkiraan capaian target tahun 2023 (n+1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

#### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008.

### **2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah**

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional (seperti NSPK, SPM, dan SDGs);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### **2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD**

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

## **2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kabupaten.

## **BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN**

### **3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional**

Bagian ini berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Bagian ini mengemukakan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

#### **3.2. Program dan Kegiatan**

Bagian ini berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

## **BAB IV:Rencana Kerja Pendanaan Perangkat Daerah**

Bagian ini berisikan tentang program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

## **BAB. V Penutup**

Bab ini berisi : catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1   Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow adalah Penjabaran Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misiorganisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BKPP Kabupaten Bolaang Mongondow selama tahun 2023 (n-2), serta pencapaian tahun berjalan tahun 2024 (n-L) dan perkiraan capaian target tahun 2024 (n).

Pada Tahun 2022, BKPP Kabupaten Bolaang Mongondow menerima anggaran sebesar Rp. 8.541.473.781,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.460.408.517,- yang digunakan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai serta Tambahan Penghasilan PNS. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.533.256.168,00 dan Belanja Modal Rp. 629.503.018,00 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 3 Program , 11 Kegiatan. 22 Sub Kegiatan Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 7.731.623.375,00 dengan Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.853.925.592,00 (85,37 %) dan realisasi Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 4.246.285.360,00 (93,67 %) dan Belanja Modal Rp. 629.503.018,00 (99,29 %) dengan capaian kinerja fisik sebesar 95,48 %, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.1. Anggaran Program dan Kegiatan BKPP Tahun 2022

No	JENIS BELANJA	TAHUN 2022		CAPAIAN (%)	KET
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	Belanja Pegawai	3,348,354,595,00	2.853.925.592,00	85,37	
2	Belanja Barang Jasa	4.533.256.168,00	4.246.285.360,00	93,67	
3	Belanja Modal	629.503.018,00	601.052.423,00	95,48	
	<b>Jumlah</b>	<b>8.541.473.781,00</b>	<b>7.731.623.375,00</b>	<b>90,51</b>	

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	KET
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.787.253.607 ,00</b>	<b>4.254.383.442,00</b>	<b>88,86</b>	
1.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.460.408.517,00</b>	<b>2.895.293.572,00</b>	<b>83,66</b>	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,348,354,595,00	2.853.925.592,00	85,23	
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39,360,000,00	39,360,000,00	100	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	42,333,922,00	41.367.980,00	97,71	
2.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah.</b>	<b>391.173.100,00</b>	<b>388.912.417,00</b>	<b>99,42</b>	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,532,600,00	3.520.000,00	99,64	
	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.012.500,00	7.814.300,00	78,10	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	377,628,000,00	377.578.117,00	98,98	

3.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b> - Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	<b>168.911.268,00</b> 168,911,268,00	<b>166.952.830,00</b> 166.952.830,00	<b>98,84</b> 98,84	
4.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	<b>32.094.642,00</b> 32.094.642,00	<b>29,016,266,00</b> 29.016.266,00	<b>90,40</b> 90,40	
6.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan. - Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	<b>734.664.080,00</b> 145.604.930,00 589.059.150,00	<b>707.087.739,00</b> 138.508.146,00 562.579.593,00	<b>96,24</b> 95,12 95,50	
II 7	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b> <b>Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN</b> -Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN. - Evaluasi Pemberhentian ASN - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN - Pengelolaan Kenaikan Pangkat	<b>1.973.885.206</b> <b>518.664.960,00</b> 343,438,890,00 22,895,630,00 29,274,260,00 123.056.180,00	<b>1.743.590.627,00</b> <b>397.353,726,00</b> 253.022.298,00 22.622.050,00 20.943.200,00 100.766.178,00	<b>88,33</b> <b>76,62</b> 73,67 98,80 71,54 81,88	
8	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>1.077.904.676,00</b>	<b>992.865.385,00</b>	<b>92,11</b>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Mutasi ASN</li> <li>- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</li> <li>- Pengelolaan Promosi ASN</li> </ul>	756.577.706,00 28.840.800,00 292.486.170,00	678.263.375,00 27.969.250,00 286.632.760,00	89,64 96,97 97,99	
9	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN</li> <li>- Koordinasi dan kerjasama Pelaksanaan Diklat</li> </ul>	<b>321.389.390,00</b>  111.876.840,00 209.512.550,00	<b>314.294.778,00</b>  111.333.350,00 202.961.428,00	<b>97,79</b>  99,51 96,87	
10	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan Disiplin ASN</li> <li>- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN.</li> </ul>	<b>55.926.180,00</b>  11.422.840,00 44.503.340 ,00	<b>39.076.738,00</b>  - 39.076.738,00	<b>69,87,00</b>  - 87,80	
III 11.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA</b> <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, an pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum</li> </ul>	<b>1.810.696.968,00</b> <b>55.166.600,00</b>  55.166.600,00	<b>1.767.409.924,00</b>  <b>47.389.850,00</b>  47.389.850,00	<b>97,60</b>  <b>85,90</b>  85,90	
11.	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan</li> </ul>	<b>1.755.530.368.00</b>  1.755.530.368,00	<b>1.720.020.000,00</b>  1.720.020.074,00	<b>97,97</b>  97,97	

	Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.541.473.781,00</b>	<b>7.731.623.375,00</b>	<b>90,52</b>	

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja BKPP Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 didasarkan pada Renstra BKPP tahun 2023-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berikut evaluasi kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.2. Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan  
Tahun 2022**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja Program dan Kegiatan			
	Indikator	Target	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Percentase Peningkatan Tata Kelola Kesekretariatan	90	100	100
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya administrasi keuangan (bulan)	12	12	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	100
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	waktu pelayanan administrasi perkantoran (Bulan)	12	12	100
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya kepatuhan Aparatur (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja Program dan Kegiatan			
	Indikator	Target	Realisasi	%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan (paket)	40	40	100
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Buah)	2	2	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis alat tulis kantor (Jumlah/Jenis)	50	50	100
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Jenis)	5	5	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Orang yang Disediakan Makan Minum (Laporan)	1	1	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan (Laporan)	1	1	100
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Sarana Penunjang Kinerja Aparatur (Unit)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan administrasi surat- menyurat (Lembar)	800	800	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	12	100
Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	12	100
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	5	5	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja Program dan Kegiatan			
	Indikator	Target	Realisasi	%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100
<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Indeks Profesionalitas ASN</b>			
Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				
Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN.	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	200	467	30,45
Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	300	300	100
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	1	100
<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Persentase pelayanan terhadap ASN secara cepat dan tepat waktu</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>100</b>
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	19	18	94,74
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500	500	100,00
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	13	13	100,00
<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Rasio jumlah ASN dalam Jabatan (Struktural/Fungsional) sesuai kompetensi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja Program dan Kegiatan			
	Indikator	Target	Realisasi	%
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN  Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat  Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur  Pembinaan Disiplin ASN  Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	6	6	100,00
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	9	9	100,00
	<b>Persentase tindak lanjut pembinaan disiplin ASN</b>			
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	218	218	100
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	1	100
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	<b>Rasio Pengembangan Kompetensi</b>			
Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis terhadap Kebutuhan organisasi	100	100	100
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, an pilihan bagi Jabata Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	80	71	76,00
Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan fungsional	100	100	100
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	174	174	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja Program dan Kegiatan			
	Indikator	Target	Realisasi	%
	Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

- a. Sedangkan belum tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan adalah Program Penelitian dan Pengembangan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi sub kegiatan Uji coba penerapan rancang bangun / model replikasi dan invensi di bidang difusi dan penerapan teknologi serta fasilitasi Hak kekayaan Intelektual. Factor penyebab karena kurangnya anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra BKPP Kabupaten Bolang Mongondow berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya;
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra BKPP Kabupaten Bolaang Mongondow berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah;
3. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.

Kebijakan yang harus dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan realisasi program kegiatan untuk mencapai target kinerja pelayanan pada BKPP Kabupaten Bolang Mongondow:

1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;

2. Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun OPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

Tabel 2.3. T – C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPP dan Pencapaian Renstra BKPP s/d Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Tahun 2021			Target Kinerja Renja tahun 2022	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022	
					Target Kinerja renja tahun 2021	Realisasi Kinerja renja tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	Perencanaan									
02.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Tata Kelola Kesekretariatan	-	-	90	100	100	100%	-	-
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan (bulan)	-	-	12	12	100	12	-	-
01 1.02 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	14	14	100	14	-	-
01 1.02 02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	waktu pelayanan administrasi perkantoran (Bulan)	-	-	12	12	100	12	-	-
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kepatuhan Aparatur (%)	-	-	100	100	100	100	-	-
5 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan (paket)	-	-	40	40	100	40	-	-
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)	-	-	12	12	100	12	-	-
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Buah)	-	-	2	2	100	2	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis alat tulis kantor (Jumlah/Jenis)	-	-	50	50	100	50	-	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Jenis)	-	-	5	5	200	5	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	-	10	30	300		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Tahun 2021			Target Kinerja Renja tahun 2022	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022	
					Target Kinerja renja tahun 2021	Realisasi Kinerja renja tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Orang yang Disediakan Makan Minum (Laporan)	-	-	1	1	100	1	-	-
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan (Laporan)	-	-	1	1	100	1	-	-
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Penunjang Kinerja Aparatur (Unit)	-	-	2	2	100	20	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	2	2	100	7	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan administrasi surat-menyurat (Lembar)	-	-	800	800	100	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	-	-	12	12	100	12	-	-
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (%)	-	-	100	100	100	100	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	-	-	5	5	110	7	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	1	1	100	1	-	-
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH N</b>	<b>Indeks Profesionalitas ASN</b>	-	-	90	100	100	90	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Tahun 2021			Target Kinerja Renja tahun 2022	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022	
					Target Kinerja renja tahun 2021	Realisasi Kinerja renja tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Rasio Kebutuhan ASN</b>			90	100	100	90		
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			288	89	30,45	89		
5.03.02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN			300	300	100	300		
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi			1	1	100	1		
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Persentase pelayanan terhadap ASN secara cepat dan tepat waktu</b>			70	70	100	70		
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			19	18	94,74	18		
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			500	500	100	500		
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	-	-	13	13	100	13		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Tahun 2021			Target Kinerja Renja tahun 2022	Perkiraa realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022	
					Target Kinerja renja tahun 2021	Realisasi Kinerja renja tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio jumlah ASN dalam Jabatan (Struktural/Fungsional) sesuai kompetensi	-	-	100	100	100	100		
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	-	-	6	6	100	6		
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			9	9	100	9		
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase tindak lanjut pembinaan disiplin ASN			70	70	100	80		
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			210	218	100	50		
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			1	1	100	1		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Pengembangan Kompetensi			60	60	100	0,53		
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis terhadap Kebutuhan organisasi			85	85	100	87		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Tahun 2021			Target Kinerja Renja tahun 2022	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022	
					Target Kinerja renja tahun 2021	Realisasi Kinerja renja tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi			85	71	76	100		
5.04.02.2.02		Jumlah ASN yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan fungsional			100	100	100	100		
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			174	170	100	-		

## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Analisis kinerja pelayanan PD menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renja Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Keberhasilan merupakan sesuatu yang bersifat relatif dan sulit diukur sehingga untuk mengetahui keberhasilan perlu dibuat indikator-indikator yang lebih dapat diukur. Oleh karena itu, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow menetapkan indikator kinerja periode 2023-2026 sebagai tolok ukur untuk dapat menilai keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator kinerja merupakan hal yang bersifat dinamis karena akan tergantung pada perkembangan kondisi, peraturan, anggaran, kebijakan dan lain-lain. Pencapaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan akan memberi gambaran tentang sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diemban.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow s/d Tahun 2024 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4 T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024(thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
1.	Cakupan Indeks Reformasi Birokrasi	-		80	85	-	-	-	-			
2.	Presentase Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas yang memiliki Kompetensi sesuai Jabatannya	-	-	61,6	67,1	-	-	-	-	-	-	
3.	Tingkat Kepatuhan Aparatur Sipil Daerah	-	-	90	0			-	-	-	-	-
4.	Cakupan Presentase Administrasi Kepegawaian yang menggunakan Aplikasi elektronik	-	-	100	100			-	-	-	-	-
5.	Indeks Merit Sistem	-	-	-	-	0,7	0,8	0,42	-	0,7	0,8	

Berdasarkan tabel diatas, ada perubahan indikator dalam pencapaian kinerja pada tahun 2023-2026. Hal ini sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 yakni dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Dalam aturan tersebut disampaikan bahwa undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil walikota yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat

Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota melalui pemilih serentak Nasional pada tahun 2024.

Sehingga Adanya aturan ini menggambarkan bahwa daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2022 tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah sebagaimana mestinya karena periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir. Disatu sisi penyusunan RKPD Tahun 2023 membutuhkan pedoman berupa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lebih lanjut menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD. Sehingga disusunlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022.

**Tabel IKK.**

Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD (2021)	Capaian Kinerja	Isian Elemen Data LPPD (2022)	Capaian Kinerja
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan perguruan tinggi keatas	1.053,00	26,60	1.053,00	26,53
	Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	3.958,00		3.969,00	
Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	Jumlah PNS fungsional (diluar guru dan tenaga Kesehatan)	133,00	7,41	166,00	9,63
	Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	1.794,00		1.724,00	

Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	133,00	100	1.724	68,07
	Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	133,00		113,00	

### **2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.**

Isu dan masalah strategis yang menjadi perhatian utama pada tahun rencana 2022 merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow serta permasalahan yang timbul pada tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi serta mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan maka dirumuskan isu-isu strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam 4 tahun kedepan yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi SDM aparatur melalui diklat, bimbingan teknis seminar Kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi pusat dan daerah.
2. Meningkatkan Disiplin ASN dilingkungan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Meningkatkan Kinerja Aparatur terhadap Pelayanan Masyarakat
4. Pemerataan ASN disetiap Perangkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan.

## **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rancangan awal RKPD tahun 2023 merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Terdapat beberapa perubahan terhadap Program/Kegiatan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya merubah beberapa nomenklatur program dan kegiatan dan penambahan kegiatan untuk rencana kerja tahun berikutnya.

Dari tinjauan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut Indikator target kinerja, target capaian, pagu indikatif, dan kebutuhan dana yang harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :

**Tabel 2.5. T.C. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	BKPP	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	90 Persen	4.000.696.439	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	BKPP	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	90 Persen	4.000.696.439
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPP	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 dokumen	3.297.892.490	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPP	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 dokumen	3.297.892.490
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPP	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	14 bln	3.220.918.106	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPP	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	14 bln	3.220.918.106
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKPP	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 bln	42.360.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKPP	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 bln	42.360.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPP	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	34.614.384	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPP	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	34.614.384
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPP	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	2 dokumen	34.423.875	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPP	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	2 dokumen	34.423.875
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKPP	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan (paket)	2 paket	34.423.875	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKPP	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan (paket)	2 paket	34.423.875
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPP	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Dokumen	224.568.631	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPP	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Dokumen	224.568.631

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPP	Jumlah Orang yang Disediakan Makan Minum (Laporan)	1 laporan	10.093.761	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPP	Jumlah Orang yang Disediakan Makan Minum (Laporan)	1 laporan	10.093.761
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPP	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan (Laporan)	1 laporan	214.474.870	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPP	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan (Laporan)	1 laporan	214.474.870
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPP	Jumlah Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	12 Bulan	90.643.176	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPP	Jumlah Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	12 Bulan	90.643.176
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPP	waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	42.022.131	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPP	waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	42.022.131
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPP	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	8 Jasa	48.621.045	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPP	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	8 Jasa	48.621.045
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPP	Jumlah Barang milik daerah yang di pelihara	29 Unit	353.168.267	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPP	Jumlah Barang milik daerah yang di pelihara	29 Unit	353.168.267
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5 unit	164.371.502	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5 unit	164.371.502
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20 unit	14.600.385	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20 unit	14.600.385
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 unit	174.196.380	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 unit	174.196.380

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Program Kepegawaian Daerah	BKPP	Percentase Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	90 persen	1.277.402.871	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BKPP	Percentase Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	90 persen	1.277.402.871
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPP	Rasio Kebutuhan ASN	Angka	778.137.193	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Lokasi	Rasio Kebutuhan ASN	Angka	778.137.193
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPP	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 dokumen	233.949.562	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPP	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 dokumen	233.949.562
	Evaluasi Pemberhentian ASN	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	143 Dokumen	51.002.169	Evaluasi Pemberhentian ASN	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	143 Dokumen	51.002.169
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPP	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 dokumen	37.402.942	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPP	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 dokumen	37.402.942
	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPP	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 berita acara	128.077.388	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPP	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 berita acara	128.077.388
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPP	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 berita acara	47.617.327	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPP	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 berita acara	47.617.327
	Mutasi dan Promosi ASN	BKPP	Percentase pelayanan terhadap ASN secara cepat dan tepat waktu	80 %			BKPP	Percentase pelayanan terhadap ASN secara cepat dan tepat waktu	80 %	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPP	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500	55.560.64	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPP	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500	55.560.64

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Pengelolaan Promosi ASN	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	527.374.156	Pengelolaan Promosi ASN	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	527.374.156
	Pengembangan Kompetensi ASN	BKPP	Rasio jumlah ASN dalam Jabatan (Struktural/Fungsional) sesuai kompetensi	70	446.171.939	Pengembangan Kompetensi ASN	BKPP	Rasio jumlah ASN dalam Jabatan (Struktural/Fungsional) sesuai kompetensi	70	446.171.939
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPP	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10 ASN	198.253.084	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPP	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10 ASN	198.253.084
	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	90 Dokumen	247.918.855	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	90 Dokumen	247.918.855
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPP	Percentase tindak lanjut pembinaan disiplin ASN	80 %	208.993.871	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPP	Percentase tindak lanjut pembinaan disiplin ASN	80 %	208.993.871
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKPP	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	50 Laporan	86.665.057	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKPP	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	50 Laporan	86.665.057
	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	BKPP	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	100 ASN	59.999.664	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	BKPP	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	100 ASN	59.999.664
	Pembinaan Disiplin ASN	BKPP	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	50 ASN	17.332.634	Pembinaan Disiplin ASN	BKPP	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	50 ASN	17.332.634

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPP	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	50 Laporan	44.996.516	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPP	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	50 Laporan	44.996.516
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>BKPP</b>	<b>Rasio Pengembangan Kompetensi</b>	<b>Angka</b>	<b>87.320.819</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>BKPP</b>	<b>Rasio Pengembangan Kompetensi</b>	<b>Angka</b>	<b>87.320.819</b>
	Pengembangan Kompetensi Teknis	BKPP	Jumlah ASN yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis terhadap Kebutuhan organisasi	Angka	87.320.819	Pengembangan Kompetensi Teknis	BKPP	Jumlah ASN yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis terhadap Kebutuhan organisasi	Angka	87.320.819
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPP	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	50 ASN	87.320.819	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPP	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	50 ASN	87.320.819

## **2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi baik dari hasil penelaahan prioritas pembangunan daerah, dan isu-isu strategis (teknokratis), yang berasal dari usulan para pemangku kepentingan kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan pokok-pokok pikiran Anggota DPRD. Berdasarkan musrenbang (partisipatif) tidak ada usulan yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Tabel 2.6. Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Bolaang Mongondow.

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-
NIHIL					
-	-	-	-	-	-

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3. 1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Penyusunan Renja Tahun 2024 BKPP memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ada di RPJMN dengan disesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah. Kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024

TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2024: “MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”	
Prioritas Nasional	
PRIORITAS 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
PRIORITAS 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesejangan dan menjamin Pemerataan,
PRIORITAS 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing
PRIORITAS 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
PRIORITAS 5	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
PRIORITAS 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana, dan Perubahan Iklim
PRIORITAS 7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Adapun kebijakan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Tema Pembangunan dan Prioritas Daerah Tahun 2024

TEMA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024: “Pengembangan Daya Saing Untuk Memaksimalkan Investasi Dan UMKM Melalui Reformasi Birokrasi Yang Handal Disertai Sukses Pemilu Serentak”	
Prioritas Daerah	
PRIORITAS 1	Stabilitas daerah yang terjamin dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak
PRIORITAS 2	Penguatan daya dukung Pelayanan publik yang prima
PRIORITAS 3	Pemetaan Potensi Investasi dan Promosi
PRIORITAS 4	Peningkatan Kualitas Pendidikan
PRIORITAS 5	Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program
PRIORITAS 6	Penguatan Koperasi, UMKM, dan Industri Pengolahan
PRIORITAS 7	Pemerataan pembangunan
PRIORITAS 8	Peningkatan kualitas pengolahan Manajemen ASN
PRIORITAS 9	Peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan
PRIORITAS 10	Pengembangan smart government dalam menunjang pengembangan smart city

Memperhatikan arah kebijakan nasional dan daerah tahun 2024, Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow mendukung secara tidak langsung prioritas Pembangunan nasional dan provinsi sebagaimana tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yaitu mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sehingga dukungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dalam pencapaian arah kebijakan Nasional dan daerah tahun 2024 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang juga merupakan penjabaran dari RPD, dan Rencana Kerja Pemerintah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.

### 3. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja BKPP Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026, seperti yang tertuang dalam Rancangan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran BKPP 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
1	2	3	4
1	MEWUJUDKAN MANAGEMEN ASN BERBASIS SISTEM MERIT		NILAI / PREDIKAT SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
		MEWUJUDKAN MANAGEMEN ASN BERBASIS SISTEM MERIT	INDEKS SISTEM MERIT

#### a. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024. Penyusunan RKPD merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan ***money follows program*** dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja). RKPD ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tahun 2024 sebagaimana terjabarkan secara rinci pada tabel berikut.

**Tabel 3.4 T-C. 33. Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Perkiraan Maju Tahun 2024**  
**BKPP Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Outpu t Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
5	0	0	1						Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																				
5	0	0	1			<b>PERENCANAAN</b>							10.109.987.813				9.731.400.597			
5	0	0	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>							4.958.049.067				4.499.366.995			
5	0	0	1	2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							3.242.366.995				3.242.366.995			
5	0	0	1	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		14 Bulan	33 Orang/bulan	14 Bulan	3.166.746.074	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Bulan	4.499.366.995	
5	0	0	1	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Tugas ASN	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Bulan	1 Dokumen	14 Bulan	42.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	42.360.000	
5	0	0	1	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		90 Persen	1 Laporan	90 Persen	54.888.735	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90 Persen	60.480.560	
5	0	0	1	2	0	<b>Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah</b>							385.000.000					3.		
5	0	0	1	2	0	Pengadaan Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah		2 Dokumen	40 Paket	40 Paket	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah	40 Paket	35.000.000	

5	0 1	0 1	2 ,	1 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25 Dokumen	50.000.000	
					Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2 Dokumen	250 Orang	250 Orang	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250 Orang	150.000.000	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2 Dokumen	15 Orang	15 Orang	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15 Orang	150.000.000	
5	0 1	0 1	2 ,	0 6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>289.262.500</b>				<b>275.000.000</b>
5	0 1	0 1	2 ,	0 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		5 Dokumen	5 Paket	5 Paket	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Paket	13.000.000	
5	0 1	0 1	2 ,	0 6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Perentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		5 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	14.262.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	14.262.500	
5	0 1	0 1	2 ,	0 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		5 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	250.000.000	
5	0 1	0 1	2 ,	0 7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										<b>600.000.000</b>				<b>150.000.000</b>
5	0 1	0 1	2 ,	0 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Pengadaan		150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150.000.000	

5	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasinal atau lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasinal atau lapangan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasinal atau lapangan		1 Unit		450.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							89.814.642						93.000.000	
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan		41.814.642	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					45.000.000	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor			8		48.000.0000				8		48.000.000	
5	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							351.604.930						354.000.000	
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			5 Unit		97.604.930	Penerimaan Pembayaran				5		100.000.000
5	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			25 Unit		50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit				50.000.000
5	0	0	2	0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit		204.000.000	Penerimaan Pembayaran		1 Unit				200.000.000
5	0	0			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							2.851.938.746						2.851.938.746	
5	0	0	2	0	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaihan ASN							971.236.890						971.236.890	
5	0	0	2	0	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk	Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN	Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN		50	200	200	344.236.890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan	200		344.236.890	

	Pelaksanaan Pengadaan ASN									Pengadaan ASN			
5 0 0 , 0 1 2 0 2 1	Evaluasi Pemberhentian ASN	Terlaksananya Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah		50	143 Dokumen	129	143 Dokumen	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	180 Dokumen	50.000.000
5 0 0 , 0 1 2 0 3 1	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi		90	1 Lemabaga	1 Lemabaga	35.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1 Lemabaga	35.000.000
5 0 0 , 0 1 2 0 4 1	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		90	4000 Dokumen	4000 Dokumen	172.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terkelolanya Data Kepegawaian	4000 Dokumen	4000 Dokumen
5 0 0 , 0 1 2 0 5 1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN		90	216 Dokumen	226 Dokumen	20.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	236 Dokumen	20.000.000
5 0 0 , 0 1 2 0 6 1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN		90	216 Dokumen	226 Dokumen	75.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN	246 Dokumen	75.000.000
5 0 0 , 0 1 2 0 7 1	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN		90	216 Dokumen	226 Dokumen	25.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	236	25.000.000
	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dirumuskannya Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN		50	15 Dokumen	15 Dokumen	50.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Dirumuskannya Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	15 Dokumen	25.000.000

	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		50	15 Dokumen	15 Dokumen	50.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	15 Dokumen	50.000.000
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN		50	70 Dokumen	70 Dokumen	25.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	70 Dokumen	25.000.000
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		50	4000 Laporan	4000 Laporan	100.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	4000 Laporan	100.000.000
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		50	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Laporan	50.000.000
5 0 0 2 , 1 2 , 0 2	Mutasi dan Promosi ASN						559.961.856					845.056.712	
5 0 0 2 , 1 2 , 0 2	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		50 Persen	15 Dokumen	15 Dokumen	509.961.856	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	17 Dokumen	462.353.356
5 0 0 2 , 1 2 , 0 2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		90 Persen	500 Pengolah an	500 Pengolah an	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	900 Pengolahan	50.000.000

	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				90 Persen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	2 Dokumen	332.703.356	
5 0 0 2 1 2 , 0 2 3	Pengembangan Kompetensi ASN							940.740.000					725.740.000	
5 0 0 2 1 2 , 0 2 3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		90	10 ASN	10 ASN	200.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	14 ASN	230.000.000
5 0 0 2 1 2 , 0 2 3	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			90 Persen	90 Dokumen	90 Dokumen	75.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	95 Dokumen	75 000.000
5 0 0 2 1 2 , 0 2 3	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN	Umlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya			90 Persen	5 ASN	5 ASN	375.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Meningkatnya Kapasitas ASN	3	150.000.000
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			90 Persen	80 Dokumen	80 Dokumen	740.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	80 Dokumen	740.000

	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN			90 Persen	3 Laporan	3 Laporan	20.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	-	-
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN			90 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Dokumen	45.000.000
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir			90 Persen	50 AS	50 ASN	225.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	50 ASN	225.000.000
	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>								<b>380.000.000</b>					<b>380.000.000</b>
	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			90 Persen	50 Persen	50Persen	15.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Meningkatnya Disiplin ASN	50 Persen	15.000.000
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			50 Persen	50 Laporan	50 Laporan	45.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		45.000.000

	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			50 Persen	25 Dokumen	25 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		50.000.000
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			50 Persen	25 Dokumen	25 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		100.000.000
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			50 Persen	18 ASN	18 ASN	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN		80.000.000
	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa			50 Persen	100 ASN	100 ASN	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN		60.000.000
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur			50 Persen	100 Dokumen	100 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		15.000.000
5 0 0 1 3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							2.300.000.000					2.310.000.000	
5 0 0 2 1 3 , 0 1	Pengembangan Kompetensi Teknis							500.000.000					510.000.000	

5 0 0 , 0 1	2 0 0 , 0 1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, erlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah			87 Angka	85 ASN	85. ASN	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	120 ASN	160.000.000
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			87 Angka	90 ASN	90 ASN	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	95 ASN	350.000.000
5 0 0 2 5 2 , 0 4	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional									1.800.000.000			1.800.000.000	

5	0	0	2	0	Penyelenggara an Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaran ya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			361 ASN	162 ASN	162 ASN	1.800.000	Penerimaan Pembayaran	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	162 ASN	1.800.000.000
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	------------	---------	---------	-----------	--------------------------	--	---------	---------------

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD tahun 2023-2026, dan RKPD Tahun 2024 maka untuk pencapaian target kinerjanya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan pada perangkat daerah.

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum pada Bab III, Tabel 3.4.

Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan berdasarkan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut :

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :**

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

**B. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH:**

1. Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN
2. Mutasi dan Promosi ASN
3. Pengembangan Kompetensi ASN
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

**C. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

1. Pengembangan Kompetensi Teknis
2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

**Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2024**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
5	0	1	0	1						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target							
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																								
<b>PERENCANAAN</b>																								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																								
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																	<b>4.912.876.752</b>							
5	0	1	2,02		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		14 Bulan	33 Orang/bulan	14 Bulan	3.166.746.074	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Bulan	4.499.366.995					
5	0	1	2,02		02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Bulan	1 Dokumen	12 Bulan	47.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	41.160.000					
5	0	1	2,02		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		90 Persen	1 Laporan	90 Persen	54.888.735	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90 Persen	60.480.560					
5	0	1	2,05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								<b>385.000.000</b>				<b>208.000.000</b>						
5	0	1	2,05		02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkappanya	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2 Dokumen	40 Paket	40 Paket	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40 Paket	35.000.000					
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25 Dokumen	50.000.000					
5	0	1	2,06		01	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2 Dokumen	250 Orang	250 Orang	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250 Orang	150.000.000					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
5	0	0	2,06	08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2 Dokumen	15 Orang	15 Orang	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	15 Orang	150.000.000		
5	0	0	2,07	06	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											600.000.000				150.000.000
5	0	0	2,09	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					11 Pengadaan		150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150.000.000	
5	0	0	2,09	06	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasinal atau lapangan	Tersediannya Kendaraan Dinas Operasinal atau lapangan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasinal atau lapangan			1 Unit		450.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0		
5	0	0	2,09	09	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											89.814.642				93.000.000
5	0	0	2,09	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan		41.814.642	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45.000.000	
5	0	0	2,09	06	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor				8		48.000.0000				8		48.000.000	
5	0	0	2,0	1	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											351.604.930				354.000.000
5	0	0	2,01	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit		97.604.930	Penerimaan Pembiayaan			5		100.000.000	
5	0	0	2,01	03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit		50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit			50.000.000	
5	0	0	2,01	04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		204.000.000	Penerimaan Pembiayaan		1 Unit			200.000.000	

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 0 0 2,0 1 2 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										2.851.938.746					2.851.938.746
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN										971.236.890					971.236.890
5 0 0 2,02 01	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN	Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				50	200	200	344.236.890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	200	344.236.890
	Evaluasi Pemberhentian ASN	Terlaksananya Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				50	143 Dokumen	129	143 Dokumen	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	180 Dokumen	50.000.000
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				90	1 Lembaga	1 Lembaga	35.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1 Lembaga	35.000.000
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				90	4000 Dokumen	4000 Dokumen	172.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terkelolanya Data Kepegawaian	4000 Dokumen	4000 Dokumen
5 0 0 2,03 01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN				90	216 Dokumen	226 Dokumen	20.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	236 Dokumen	20.000.000
5 0 0 2,03 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN				90	216 Dokumen	226 Dokumen	75.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN	246 Dokumen	75.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN			90	216 Dokumen	226 Dokumen	25.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	236	25.000.000
	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dirumuskannya Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN			50	15 Dokumen	15 Dokumen	50.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Dirumuskannya Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	15 Dokumen	25.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			50	15 Dokumen	15 Dokumen	50.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	15 Dokumen	50.000.000
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN			50	70 Dokumen	70 Dokumen	25.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	70 Dokumen	25.000.000
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolaanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			50	4000 Laporan	4000 Laporan	100.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terkelolaanya Sistem Informasi Kepegawaian	4000 Laporan	100.000.000
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			50	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Laporan	50.000.000
5 0 0 2,0 1 3 1	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>								<b>559.961.856</b>				<b>845.056.712</b>	
5 0 0 2,01 04	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			50 Persen	15 Dokumen	15 Dokumen	509.961.856	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	17 Dokumen	462.353.356

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 0 0 1 3 2,01 07	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			90 Persen	500 Pengolahan	500 Pengolahan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	900 Pengolahan	50.000.000
5 0 0 1 3 2,01 08	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			90 Persen				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	2 Dokumen	332.703.356
5 0 0 1 3 2,0 2	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>								<b>940.740.000</b>					<b>725.740.000</b>
5 0 0 1 3 2,02 02	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		90	10 ASN	10 ASN	200.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	14 ASN	230.000.000
5 0 0 1 3 2,02 03	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			90 Persen	90 Dokumen	90 Dokumen	75.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	95 Dokumen	75.000.000
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN	umlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya			90 Persen	5 ASN	5 ASN	375.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Meningkatnya Kapasitas ASN	3	150.000.000
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			90 Persen	80 Dokumen	80 Dokumen	740.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	80 Dokumen	740.000
	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN			90 Persen	3 Laporan	3 Laporan	20.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	-	-

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
			Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN			90 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Dokumen	45.000.000	
			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir			90 Persen	50 ASN	50 ASN	225.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	50 ASN	225.000.000	
5	0	0	2,02	06	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN	umlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya		90 Persen	5 ASN	5 ASN	375.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Meningkatnya Kapasitas ASN	3	150.000.000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
5	0	0	2,02		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							380.000.000				380.000.000		
5	0	0	2,02	01	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			90 Persen	50 Persen	50Persen	15.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Meningkatnya Disiplin ASN	50 Persen	15.000.000
5	0	0	2,02	02	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			50 Persen	50 Laporan	50 Laporan	45.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		45.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			50 Persen	25 Dokumen	25 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksana ya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		50.000.000	
				Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			50 Persen	25 Dokumen	25 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksana ya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		100.000.000	
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			50 Persen	18 ASN	18 ASN	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksana ya Pemberian Penghargaan bagi ASN		80.000.000	
				Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa			50 Persen	100 ASN	100 ASN	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksana ya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN		60.000.000	
				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur			50 Persen	100 Dokumen	100 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksana ya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		15.000.000	
5	0	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6.739.600.046				6.652.876.752		
5	0	0	1	2,02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								2.300.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			2.320.000.000	
					Pengembangan Kompetensi Teknis								500.000.000	Pengembangan Kompetensi Teknis			520.000.000	
				Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Izajah			87 Angka	85 ASN	85. ASN	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti,	120 ASN	160.000.000	

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, erlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum								dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi			87 Angka	90 ASN	90 ASN	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksana ya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	95 ASN	350.000.000
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						1.800.000.000	Pengembangan Kompetensi Teknis			1.800.000.000		

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	361 ASN	162 ASN	162 ASN	1.800.000	Penerimaan Pembayaran		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	162 ASN	1.800.000.00	

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2024. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencanaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow secara umum dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan secara khusus maka Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow dan Renstra Badaan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu bidang dan lintas bidang, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi serta ketersediaan anggaran pemerintah daerah tahun anggaran bersangkutan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan kabupaten Bolaang Mongondow guna mewujudkan Bolaang Mongondow yang Hebat.

Lolak, Juli 2023

